

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah	: Sejarah Indonesia Pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin
Kode/SKS	: Sej. 306/3 SKS
Mata Kuliah Prasyarat	: -
Semester	: Genap
Dosen/Asisten	:.Didin Saripudin Ph.D./Farida Sarimaya, M.Si./ Prof. Dr. H. Ismaun, M.Pd

Deskripsi Mata Kuliah

Mata Kuliah Sejarah Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin mengkaji mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa RIS, masa Demokrasi Liberal dan masa Demokrasi Terpimpin yang ditinjau dari sudut politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

Tujuan Umum Perkuliahan

Secara umum tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan dan kemampuan mengevaluasi kisah sejarah perjuangan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia periode 1949-1965 terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem pemerintahan, politik luar negeri, sistem ekonomi, kehidupan sosial budaya dan pertahanan keamanan pada masa RIS, Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin.

Pertemuan 1 dan 2

No	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Tujuan Khusus	Proses Belajar	Evaluasi	Sumber / Kepustakaan
1.	Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada Masa RIS	Melalui curah pendapat dan ceramah bervariasi diharapkan mahasiswa dapat:	Pendahuluan (20 menit) 1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen tentang sistem perkuliahan Sejarah Nasional Indonesia VI (waktu, metode pembelajaran, penugasan dan penilaian). 2. Mahasiswa bercurah pendapat untuk menyepakati peraturan perkuliahan yang diterapkan	Formartif Jenis Tes:Lisan : Post Test Non tes : Pengamatan	Pesponsegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto,1984, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta:Balai Pustaka. Bab III.
1.1	Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan				
1.2	Konstitusi RIS	1. Menyepakati ruang lingkup pembahasan mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia VI sesuai			
1.3	Kembali ke NKRI				
1.4	Gangguan Kemanan				

1.5	dalam Negeri Proses Pembuatan UUDS 1950	dengan silabus 2. Menjelaskan bentuk negara RIS dengan benar 3. Menjelaskan sistem pemerintahan RIS dengan benar 4. Membandingkan antara Konstitusi RIS dengan UUD 1945 5. Menerangkan alasan-alasan bangsa Indonesia kembali ke NKRI 6. Membandingkan gerakan APRA, Andi Azis dengan RMS 7. Menjelaskan proses pembuatan UUDS 1950	<p>Pembelajaran (260 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menyimak silabus Sejarah Nasional Indonesia VI 2. Mahasiswa menyatakan persetujuan terhadap ruang lingkup pembahasan Sejarah Nasional Indonesia VI 3. Mahasiswa menyimak penjelasan melalui transparan materi tentang Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan RIS 4. Mahasiswa melakukan tanya jawab dengan dosen dan antar mahasiswa mengenai Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan RIS 5. Mahasiswa telah membaca dan membawa Konstitusi RIS pada pertemuan kedua. 6. Beberapa orang mahasiswa berbicara untuk menjelaskan Konstitusi RIS dan membandingkannya dengan UUD 1945 7. Mahasiswa menyimak penjelasan melalui transparan materi tentang Kembali ke NKRI, Gangguan Keamanan dalam Negeri dan Proses Pembuatan UUDS 1950 8. Mahasiswa melakukan tanya jawab dengan dosen dan antar mahasiswa mengenai Konstitusi RIS, Kembali ke NKRI, Gangguan Keamanan dalam Negeri dan Proses Pembuatan UUDS 1950 <p>Penutup (20 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen tentang kesimpulan materi. 2. Mahasiswa menerima tugas untuk membaca materi Masa demokrasi Liberal dan membawa teks UUDS 1950 pada pertemuan berikutnya. 	partisipasi dalam kegiatan di kelas	<p>Ricklefs, M.C. 1995, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. Bab 17.</p> <p>Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti. Bab I dan Lampiran 6</p> <p>Nasution, Adnan Buyung, dkk, 2000, Federalisme untuk Indonesia, Jakarta:Kompas. Bab I</p> <p>Noer, Deliar,, 1990, Mohammad Hatta:Biografi Politik, Jakarta:LP3ES. Bab VIII.</p> <p>Notosusanto, Nugroho, dkk, 1985, Pejuang dan Prajurit:Konsepsi dan Implementasi Dwi Fungsi ABRI, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. Bab II.</p> <p>Sunddhaussen, Ulf, 1988, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Jakarta:LP3ES. Bab II</p>
-----	--	---	---	-------------------------------------	--

Pertemuan 3, 4 dan 5

No	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Tujuan Khusus	Proses Belajar/Waktu	Evaluasi	Sumber / Kepustakaan
2.	Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada Masa Demokrasi Liberal	Melalu ceramah dan diskusi diharapkan mahasiswa dapat:	Pendahuluan (10 menit) 1. Apersepsi melalui tanya jawab	Formartif Jenis Tes:Lisan : Post Test	Haris, Syamsuddin, 1995, Demokrasi di Indonesia:Gagasan dan Pengalaman, Jakarta:LP3ES. Bab III dan IV
2.1	Sistem Politik Kenegaraan menurut UUDS 1950	1. Menyimpulkan sistem politik kenegaraan menurut UUDS 1950 dengan benar	Pembelajaran (420 menit) 1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui penayangan transparant materi tentang Sistem Politik Kenegaraan menurut UUDS 1950.	Non tes :	Harvey, Barbara Sillars, 1991, Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tardisi ke DI/TII, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
2.2	Instabilitas Politik dan Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal	2. Membandingkan UUDS 1950 dengan Konstitusi RIS.	3. Menjelaskan ketidakstabilan politik pada masa Demokrasi Liberal	Pengamatan partisipasi dalam kegiatan di kelas	Ismaun, 1998, Sejarah Nasional Indonesia VI (1949-1965) (Diktat), Bandung:Jurusan Pend. Sejarah FPIPS IKIP Bandung. Bagian 1.
2.3	Masalah Angkatan Perang	3. Menjelaskan ketidakstabilan kabinet pada masa Demokrasi Liberal	4. Menjelaskan ketidakstabilan kabinet pada masa Demokrasi Liberal	Laporan diskusi kelompok	Jackson,Karl D, 1991, Kewibawaan Tradisional,Islam, dan Pemberontakan: Kasus Darul Islam Jawa Barat, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
2.4	Gangguan Keamanan dalam Negeri	4. Menjelaskan ketidakstabilan kabinet pada masa Demokrasi Liberal	5. Menerangkan terjadinya konflik dalam tubuh angkatan perang		Leirissa, R.Z, 1997, PRRI Permesta:Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti
2.5	Mencari sistem Ekonomi Nasional	5. Menerangkan terjadinya konflik dalam tubuh angkatan perang	6. Menjelaskan hubungan sipil-militer pada masa Demokrasi Liberal		Sjamsuddin, Nazaruddin,1990, Pemberontakan Kaum Republik:Kasus Darul Islam Aceh, Jakarta:Pustaka Utama Garfiti
		6. Menjelaskan hubungan sipil-militer pada masa Demokrasi Liberal	7. Menunjukkan hubungan antar gerakan DI/TII di Indonesia		
		7. Menunjukkan hubungan antar gerakan DI/TII di Indonesia	8. Menarik kesimpulan berbagai kesamaan gerakan DI/TII di Indonesia		
		8. Menarik kesimpulan berbagai kesamaan gerakan DI/TII di Indonesia	9. Mengemukakan berbagai penafsiran dari para ahli mengenai peristiwa DI/TII		
		9. Mengemukakan berbagai penafsiran dari para ahli mengenai peristiwa DI/TII	10.Menguarakan gerakan PRRI/Permesta.		
		10.Menguarakan gerakan PRRI/Permesta.	11.Menjelaskan usaha-usaha membentuk sistem ekonomi nasional		
		11.Menjelaskan usaha-usaha membentuk sistem ekonomi nasional	12.Menjelaskan sistem ekonomi Benteng		
		12.Menjelaskan sistem ekonomi Benteng			

		<p>13. Mengkategorikan keberhasilan dan kegagalan pada masa Demokrasi Liberal</p>	<p>Penutup (20 menit)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mahasiswa menyimak kesimpulan materi 2. Mahasiswa menerima tugas untuk membaca literatur mengenai politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Liberal 	<p>Ricklefs, M.C. 1995, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bab 18.</p> <p>Muhaimin, Yahya A, 1982, Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Bab III</p> <p>Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. Bab IV dan Lampiran 7</p> <p>Noer, Deliar., 1990, Mohammad Hatta: Biografi Politik, Jakarta: LP3ES. Bab VIII.</p> <p>Sunddhaussen, Ulf, 1988, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Jakarta: LP3ES. Bab III</p> <p>Van Dijk, C., 1989, Darul Islam: sebuah Pemberontakan, Jakarta: Pustaka Grafiti Utama</p>
--	--	---	--	--

Pertemuan 6 dan 7

No	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Tujuan Khusus	Proses Belajar/Waktu	Evaluasi	Sumber / Kepustakaan
3	Membina Solidaritas Bangsa-bangsa Asia Afrika	Melalui ceramah, penugasan dan diskusi diharapkan mahasiswa dapat :	Pendahuluan (10 menit) 1. Mahasiswa menyimak pengemas awal dari dosen berkaitan dengan Konfrensi Asia Afrika.	Formartif Jenis Tes:Lisan : Post Test	Sekretariat Negara RI, 1985, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada. Hal.79-82 Kartodirdjo, Sartono, 1977, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta: Gramedia. Hal. 373-384 Pesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto,1984, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta:Balai Pustaka. Bab III.
3.1	Politik Luar Negeri Setelah Pengakuan Kedaulatan	1. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia setelah pengakuan kedaulatan	Pembelajaran (270 menit) 1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui penayangan transparant materi tentang Politik Luar negeri Setelah Pengakuan Kedaulatan, Antara Dua Kekuatan Dunia dan Konfrensi Asia Afrika	Non tes :	
3.2	Antara Dua kekuatan Dunia	2. Menjelaskan konstelasi politik dunia pada masa Demokrasi Liberal	2. Mahasiswa bertanya jawab tentang materi yang dijelaskan dosen	Pengamatan partisipasi dalam kegiatan di kelas	
3.3.	Konfrensi Asia-Afrika (KAA)	3. Menerangkan sikap dan posisi Indonesia dalam situasi Perang Dingin	3. Dibentuk kelompok dan penugasan untuk melakukan penelitian sederhana di Museum KAA	Laporan penelitian kelompok	
		4. Menjelaskan dua konferensi sebelum KAA	4. Mahasiswa melakukan penelitian sederhana di Museum KAA di luar jam perkuliahan		
		5. Menjelaskan jalannya pelaksanaan KAA	5. Mahasiswa melakukan diskusi kelas mengenai hasil penelitian sederhananya di Museum KAA yang dipandu oleh dosen, dengan cara masing-masing kelompok menyajikan laporannya dan yang lain mengkritisinya.		
		6. Menguraikan hasil KAA	Penutup (20 menit) 1. Mahasiswa menyimak kesimpulan materi		
		7. Menyimpulkan pengaruh KAA bagi dunia	2. Mahasiswa menerima tugas untuk membaca literatur mengenai Pemilu Tahun 1955		
		8. Menerangkan keuntungan yang diperoleh Indonesia sebagai tuan rumah KAA			

Pertemuan 8 dan 9

No	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Tujuan Khusus	Proses Belajar/Waktu	Evaluasi	Sumber/ Kepustakaan
4 4.1 4.2 4.3	Melaksanakan Pemilu I Penilihhan Umum dan Hasilnya Sidang-sidang Konstituante Krisis yang Dihadapi Sesudah Pemilu I	Melalui ceramah bervariasi diharapkan mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan dasar perundang-undangan pelaksanaan Pemilu tahun 1955 2. Menjelaskan pelaksanaan Pemilu tahun 1955 3. Menjelaskan Hasil Pemilu tahun 1955 4. Membandingkan Pemilu 1955 dengan Pemilu 1971 5. Menggambarkan Organisasi Konstituante dengan tepat 6. Membuat skema persidangan Konstituante dengan baik 7. Menjelaskan hasil-hasil sidang Konstituante 8. Mengkritik sidang-sidang Konstituante 9. Menjelaskan meruncingnya perpecahan nasional sesudah Pemilu I	Pendahuluan (10 menit) 1. Apersepsi melalui tanya jawab Pembelajaran (420 menit) 1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui penayangan transparant materi tentang Pemilu I dan Hasilnya 2. Mahasiswa memperhatikan partai politik peserta Pemilu dan gambarnya yang diperlihatkan oleh dosen 3. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui penayangan transparant materi tentang Sidang-sidang Konstituante dan Krisis yang Dihadapi sesudah Pemilu I 4. Mahasiswa bertanya jawab tentang materi yang dijelaskan dosen Penutup (20 menit) 1. Mahasiswa menyimak kesimpulan materi 2. Mahasiswa menerima tugas untuk membandingkan Pemilu 1955 dengan Pemilu 1971 dan membuat skema persidangan Konstituante 3. Mahasiswa menerima tugas untuk membawa teks Dekrit 5 Juli 1959 pada pertemuan berikutnya	Formartif Jenis Tes:Lisan : Post Test Non tes : Pengamatan partisipasi dalam kegiatan di kelas	Anshari, H. Endang Saifuddin, 1997, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara RI, Jakarta:Gema Insani Press. Bab II Feith, Herbeth, 1962, The Decline of Constitutionil in Indonesia, Ithaca: Cornell University Press. Karim, M. Rusli, 1983, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut, Jakarta:Rajawali Pers. Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti. Bab I, II, III dan IV Noer, Deliar, 1987, Partai Islam di Pentas Nasional, Jakarta: Grafiti Pers.

Pertemuan 10 dan 11

No	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Tujuan Khusus	Proses Belajar/Waktu	Evaluasi	Sumber / Kepustakaan
5 5.1 5.2 5.3	Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 Konsepsi Soekarno Dekrit 5 Juli 1959 Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin	Melalui ceramah bervariasi dan diskusi kelas diharapkan mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan alasan dan pertimbangan kembali ke Undang-undang Dasar 1945 2. Menjelaskan langkah-langkah Presiden Soekarno untuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 3. Menjelaskan konsepsi Soekarno mengenai Demokrasi Terpimpin 4. Menganalisa isi Dekrit 5 Juli 1959 5. Menjelaskan pihak-pihak yang mendukung Dekrit 5 Juli 1959 6. Menjelaskan pihak-pihak yang menentang Dekrit 5 Juli 1959 7. Menjelaskan bentuk Demokrasi Terpimpin 8. Menjelaskan bentuk Ekonomi Terpimpin	Pendahuluan (10 menit) Mahasiswa menjawab pertanyaan apersepsi dosen berkaitan dengan konflik-konflik sosial yang terjadi di masyarakat sekitar dan faktor penyebabnya. Pembelajaran (175 menit) 1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui transparan materi tentang Kembali ke Undang-undang Dasar 1945 2. Mahasiswa membaca dan menganalisa isi Dekrit 5 Juli 1959 3. Mahasiswa bertanya jawab tentang materi yang dijelaskan dosen dan mengenai isi Dekrit 5 Juli 1959 4. Beberapa orang mahasiswa diberi kesempatan untuk menanggapi isu kontroversial seputar Dekrit 5 Juli 1959. 5. Mahasiswa melakukan diskusi kelas mengenai isu kontroversial seputar Dekrit 5 Juli 1959 yang dipandu oleh dosen Penutup (15 menit) 1. Mahasiswa menyimak kesimpulan materi 2. Mahasiswa diberi tugas untuk membaca materi. tentang masa Demokrasi Terpimpin	Formartif Jenis Tes:Lisan : Post Test Non tes : Pengamatan partisipasi dalam kegiatan di kelas	Anshari, H. Endang Saifuddin, 1997, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional tentang Dasar Negara RI, Jakarta:Gema Insani Press. Bab II Ismaun, 1998, Sejarah Nasional Indonesia VI (1949-1965) (Diktat), Bandung:Jurusan Pend. Sejarah FPIPS IKIP Bandung. Bagian II. Nasution, Adnan Buyung, 1995, Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia, Jakarta:Pustaka Utama Grafiti. Bab V Pespongoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, 1984, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta:Balai Pustaka. Bab IV.

Pertemuan 12, 13 dan 14

No	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Tujuan Khusus	Proses Belajar/Waktu	Evaluasi	Sumber / Kepustakaan
6	Kehidupan Berbangsa dan Bernegara pada Masa Demokrasi Terpimpin	Melalui ceramah dan diskusi diharapkan mahasiswa dapat :	Pendahuluan (10 menit) 1. Apersepsi melalui tanya jawab	Formartif Jenis Tes:Lisan : Post Test	Adams, Cindy, 1966, Soekarno Penyambung Lidah rakyat, Jakarta: Gunung Agung
6.1	Gagasan Nasakom	1. Menjelaskan gagasan Nasakom	Pembelajaran (420 menit)	Non tes :	Dake, Antonie C.A. 1973, In the spirit of Red Banteng: Indonesian communist between Moscow and Peking 1959-1965
6.2	Sistem Politik Kenegaraan	2. Menjelaskan implementasi USDEK dalam kehidupan politik dan pemerintahan	1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui penayangan transparant materi tentang Gagasan Nasakom Sistem, Politik Kenegaraan, Politik Luar Negeri, Konfrontasi dengan Malaysia, Indonesia Keluar dari PBB, Usaha PKI untuk Menguasai Buruh dan Tani, Usaha PKI untuk Menguasai Partai-partai Politik	Pengamatan partisipasi dalam kegiatan di kelas	Haris, Syamsuddin, 1995, Demokrasi di Indonesia:Gagasan dan Pengalaman, Jakarta:LP3ES. Bab III dan IV
6.3	Politik Luar Negeri	3. Menyimpulkan pelaksanaan Demokrasi Terpimpin dalam kehidupan politik dan pemerintahan oleh Presiden Soekarno	2. Mahasiswa bertanya jawab tentang materi yang dijelaskan dosen	Laporan diskusi kelompok	Ismaun, 1998, Sejarah Nasional Indonesia VI (1949-1965) (Diktat), Bandung:Jurusan Pend. Sejarah FPIPS IKIP Bandung. Bagian II.
6.4	Konfrontasi dengan Malaysia	4. Membandingkan Demokrasi Liberal dengan demokrasi Terpimpin	3. Dibentuk kelompok-kelompok diskusi untuk mendiskusikan isu kontroversial pada masa Demokrasi Terpimpin. Diskusi dilakukan dikelas dan dilanjutkan diluar kelas untuk membuat laporan hasil diskusi kelompok.		Ricklefs, M.C. 1995, Sejarah Indonesia Modern, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press. Bab 19.
6.5	Indonesia Keluar dari PBB	5. Menjelaskan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin	4. Mahasiswa melakukan diskusi kelas mengenai isu kontroversial pada masa Demokrasi Terpimpin yang dipandu oleh dosen, dengan cara masing-masing kelompok menyajikan laporan diskusi kelompok dan yang lain mengkritisinya.		Sunddhaussen, Ulf, 1988, Politik Militer Indonesia 1945-1967, Jakarta:LP3ES. Bab IV dan V
6.6	Usaha PKI untuk Menguasai Buruh dan Tani	6. Menghubungkan politik luar negeri Indonesia dengan konfrontasi terhadap Malaysia	5. Mahasiswa bersama dosen mengelompokkan keberhasilan dan		
6.7	Usaha PKI untuk Menguasai Partai-partai Politik	7. Menjelaskan alasan Indonesia keluar dari PBB			
6.8	Usaha PKI untuk Menguasai TNI dan Kepolisian	8. Menjelaskan usaha PKI menguasai buruh-tani			
6.9	Kehidupan Ekonomi dan Sosial-Budaya	9. Menjelaskan usaha PKI menguasai partai-partai politik			
		10. Menjelaskan usaha PKI menguasai TNI dan Kepolisian			
		11. Menarik kesimpulan bentuk-bentuk usaha PKI dalam menguasai lawan politiknya			
		12. Menjelaskan keadaan ekonomi pada			

		<p>masa Demokrasi Terpimpin</p> <p>13. Menjelaskan kehidupan sosial budaya pada masa Demokrasi Terpimpin</p>	<p>kegagalan pada masa Demokrasi Terpimpin.</p> <p>Penutup (20 menit)</p> <p>3. Mahasiswa menyimak kesimpulan materi</p> <p>4. Mahasiswa menerima tugas untuk membaca literatur mengenai perjuangan pengambalian Irian Barat</p>		<p>Soekarno,1964, Di Bawah Bendera Revolusi II, Jakarta: Panitia Di Bawah Bendera Revolusi</p> <p>Pespongoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto,1984, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta:Balai Pustaka. Bab IV.</p>
--	--	--	---	--	---

Pertemuan 15 dan 16

No	Pokok Bahasan/ Sub Pokok Bahasan	Tujuan Khusus	Proses Belajar/Waktu	Evaluasi	Sumber/ Kepustakaan
7	Perjuangan Pengembalian Irian Barat	Melalui ceramah bervariasi diharapkan mahasiswa dapat :	Pendahuluan (10 menit) 1. Mahasiswa menyimak pengemas awal dari dosen berkaitan dengan perjuangan pengembalian Irian Barat	Formartif Jenis Tes:Lisan : Post Test	Ismail,dkk.,1971, Irian Barat dari Masa ke Masa, Jakarta: Kodam XVII Cendrawasih.
7.1	Masalah Irian Barat di PBB	1. Menjelaskan usaha-usaha Indonesia dalam menyelesaikan masalah Irian Barat di PBB			
7.2	Konfrontasi Indonesia-Belanda mengenai Masalah Irian Barat	2. Menjelaskan kegagalan usaha Indonesia di PBB dalam mengembalikan Irian Barat	Pembelajaran (80 menit) 1. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui penayangan transparant materi tentang Masalah Irian Barat di PBB, Konfrontasi Indonesia-Belanda mengenai Masalah Irian Barat	Non tes : Pengamatan partisipasi dalam kegiatan di kelas	Sekretariat Negara RI, 1985, 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964, Jakarta: Citra Lamtoro Gung Persada. Hal.183-184, 194-197, 201-208, dan 214-216
7.3	Penyerahan Irian Barat ke Indonesia	3. Menerangkan konfrontasi Indonesia terhadap Belanda dalam bidang sosial ekonomi dalam rangka mengembalikan Irian Barat 4. Menjelaskan langkah-langkah Indonesia dalam melakukan konfrontasi bersenjata dengan Belanda dalam masalah Irian Barat 5. Menjelaskan peranan PBB dalam menyelesaikan masalah Irian Barat 6. Menjelaskan proses penyerahan Irian Barat dari Belanda ke Indonesia	5. Mahasiswa menunjukkan peta Irian Barat dan peta peristiwa Laut Aru pada peta yang telah disediakan oleh dosen 6. Mahasiswa menyimak penjelasan dosen melalui penayangan transparant materi tentang Penyerhan Irian Barat ke Indonesia yang dijelaskan dosen 7. Mahasiswa bertanya jawab tentang materi yang dijelaskan dosen		Pesponsegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto,1984, Sejarah Nasional Indonesia VI, Jakarta:Balai Pustaka. Bab IV.
			Penutup (10 menit) 1. Mahasiswa menyimak kesimpulan materi 2. Mahasiswa diberi tugas untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi Ujian Akhir Semester (UAS)		

